

**PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI BLU
WILAYAH YOGYAKARTA)**

Agus Santosa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
santosa.agus@upnyk.ac.id

Aditya Kurniawardana

Mahasiswa Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
adityakurniawardana@upnvj.ac.id

Gita Astyka Rahmanda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
gitaastyka@upnyk.ac.id

ABSTRAK

Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri BLU Wilayah Yogyakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penatausahaan dan penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perguruan tinggi negeri, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian dilakukan di 3 PTN (2 BLU 1 satuan kerja) sebagai entitas Kemendikbudristek, menggunakan data primer (kuesioner), data sekunder Laporan Neraca Keuangan Tahun 2018 s.d. 2021 Audited di perguruan tinggi negeri di wilayah Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 45 pegawai akuntansi aset dan akuntansi keuangan dari 3 PTN. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 23 dengan variabel independen adalah pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan SIMAK-BMN variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. **Kata Kunci:** Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Penerapan SIMAKBMN, dan Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

The Effect of Administration and Application of State Property Accounting Management Information System (SIMAK BMN) on the Quality of Financial Reports (Case Study in the Work Unit of State Universities BLU in Yogyakarta Region). The purpose of this research is to analyze the effect of administration and application SIMAK BMN on the quality of financial reports in work units of state universities, either simultaneously or partially. The research was conducted

in 3 PTN (2 BLU 1 work unit) as Kemendikbudristek entities, by used primary data (questionnaires), secondary data from 2018 to 2021 Audited Financial Reports at State Universities in the Yogyakarta area. The sample in this research were 45 employees of asset accounting and financial accounting from 3 PTN. This research used multiple linear regression analysis model with SPSS 23 software with independent variables are bookkeeping, inventory, reporting, application of SIMAK BMN, and the dependent variable is the quality of financial reports. The results of the research prove that bookkeeping, inventory, reporting, and the application of SIMAK BMN simultaneously affect to the quality of financial reports. Partially it was found that bookkeeping, inventory, reporting, and application of SIMAK BMN had a significant positive effect to the quality of financial reports.`

Keywords: *Bookeeping, Inventory, Reporting, Application of SIMAK-BMN, Quality of Financial Reports.*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi di bidang Keuangan Negara ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pasal 1 ayat (3) menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan pemerintah, adapun salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual selanjutnya dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

Kualitas laporan keuangan (LK) yang lebih baik dari periode sebelumnya, ditandai dengan indikator opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu upaya untuk mewujudkan opini WTP dari BPK tersebut adalah melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (UU No.17 Tahun 2003:Pasal 9 huruf g).

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan dan penatausahaan BMN menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien maka diperlukan suatu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Aset BMN yaitu

SIMAK BMN, e-Rekon dan SAKTI untuk membantu mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi dalam penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku (PMK No.233/PMK.05/2011:Pasal 1 ayat 23).

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan dikatakan andal apabila Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan dapat dibandingkan apabila Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Dalam penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN) pada satuan kerja (satker) perguruan tinggi negeri wilayah Yogyakarta sebagai objek penelitian dalam laporan BMN di Neraca periode Tahun Anggaran 2018 s.d. Tahun Anggaran 2021 Audited tercatat posisi asset di neraca sangat besar nilai netto sebesar Rp8.606.102.200.383,- sebagaimana dalam rincian pada Tabel 1 sebagai berikut:

**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
TAHUN ANGGARAN 2018 S/D 2021 (AUDITED)**

UAKPB: 2 PTN BLU dan 1 PTN Satker Kemendikbudristek Wilayah D.I. Yogyakarta

KODE	URAIAN AKUN NERACA	NETTO 2018	NETTO 2019	NETTO 2020	NETTO 2021
117111	Persediaan	15.812.004.078	13.566.493.456	28.446.480.462	17.862.214.598
131111	Tanah	4.467.089.018.859	4.586.385.509.859	6.502.537.023.509	6.702.537.023.509
132111	Peralatan dan Mesin	165.977.118.104	126.519.270.038	217.819.131.266	223.074.686.229
133111	Gedung dan Bangunan	825.247.231.247	879.861.231.179	1.248.252.012.525	1.294.226.857.893
134111	Jalan dan Jembatan	549.496.466	1.134.928.680	293.257.888	283.338.094
134112	Irigasi	2.205.831.915	2.437.890.010	2.003.151.469	2.437.890.010
134113	Jaringan	9.222.201.146	9.583.222.990	9.000.448.011	9.950.462.241
135121	Aset Tetap Lainnya	55.544.853.698	52.437.523.114	61.855.985.277	62.340.836.006
136111	Kontruksi Dalam Pengerjaan	147.854.459.001	115.500.636.701	149.692.804.401	122.217.341.630
162151	Software	2.126.787.100	4.398.769.940	3.062.646.698	3.840.650.746
162161	Lisensi	140.702.414.191	163.820.330.057	117.584.498.325	122.626.922.172
162171	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	891.884.000

162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	146.894.000	146.894.000	393.899.000	14.000.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	45.521.033.304	46.519.989.476	44.638.560.269	43.798.093.255
JUMLAH KESELURUHAN		5.877.999.343.109	6.002.312.689.500	8.385.579.899.100	8.606.102.200.383
PERTUMBUHAN MUTASI DI NERACA (-/+)		4%	2%	40%	3%

Sumber Tabel-1: Data Sekunder SIMAK BMN, e-Rekon/LK pada Neraca Periode 2018 s.d 2021

Neraca tersebut terdiri dari akun Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), serta Aset Tak Berwujud (ATB), dimana data keuangan dan barang diproses dan kompilasi pada aplikasi SIMAK BMN, e-Rekon, dan e-SAKTI, sehingga dokumen aset BMN bisa lebih tertib dan valid serta lebih mudah teridentifikasi, penyajian data aset BMN dapat diketahui dengan penyusunan laporan aset BMN di neraca menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun mulai 2% s.d. 40%.

Salah satu masalah utama pengelolaan barang milik negara di satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta adalah belum optimalnya kesadaran SDM dalam pelaksanaan penertiban penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Menurut Doli D. Siregar (2004:519) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup pekerjaan manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, identifikasi dan mencari solusi permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Legal audit diperlukan setelah proses inventarisasi aset karena setiap aset yang dimiliki negara harus jelas status kepemilikannya, untuk mencegah potensi sengketa ataupun penyerobotan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang ingin mengambil aset milik negara.

Menurut Amiri Kartika (2015:33) permasalahan klasik yang sering timbul di lapangan seperti manajemen sumber daya manusia terhadap ketidak pedulian dalam penatausahaan aset yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan penyusunan pelaporan yang belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara terhadap laporan keuangan satuan kerja perguruan tinggi negeri setiap tahun masih terdapat catatan temuan berulang masalah pengelolaan BMN.

Penerapan SIMAK BMN dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di lihat dari hasil penelitian (Nasrudin 2015) yang mengatakan bahwa dalam penerapan Sistem

Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dengan benar dan optimal dapat menghasilkan kualitas informasi BMN yang digunakan oleh suatu entitas akuntansi barang, sehingga dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan, hal ini terbukti dengan adanya kemajuan opini yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK. Status Opini WTP dapat dipertahankan oleh kementerian/lembaga, yang secara langsung merupakan peran dari penerapan SIMAK-BMN dalam menyajikan laporan barang milik negara.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta fenomena yang terjadi di satuan kerja perguruan tinggi negeri Kemendikbudristek wilayah Yogyakarta mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait "Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri BLU Wilayah Yogyakarta". Dalam penelitian ini menggunakan 4 Variabel Independen yang terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Penerapan SIMAK BMN dan 1 Variabel Dependen yakni Kualitas Laporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, populasi, serta memperluas sampel penelitian dengan menggunakan seluruh sebaran kuesioner pegawai yang selama ini menangani akuntansi aset BMN dan akuntansi keuangan di satuan kerja.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembukuan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
2. Apakah Inventarisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan? dan
4. Apakah Penerapan SIMAK BMN berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembukuan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Untuk mengetahui Inventarisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3. Untuk mengetahui Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

dan

4. Untuk mengetahui Penerapan SIMAK BMN berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

II. LANDASAN TEORI

Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN pada pasal 3 menyatakan bahwa Ruang lingkup kegiatan Penatausahaan BMN meliputi: a. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang; b. Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan c. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

1. Pembukuan Barang Milik Negara;

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 pasal 3 huruf (a) Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang, meliputi : pencatatan semua aset BMN, mutasi aset BMN, hasil inventarisasi ke dalam buku barang dan Kartu Identitas Barang (KIB), mencatat semua perubahan atas perpindahan dan perubahan kondisi barang, melakukan penghapusan atas barang rusak berat dan barang hilang, serta melakukan reklasifikasi untuk setiap barang hilang yang ditemukan kembali.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 84 menjelaskan bahwa Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang, adapun maksud dilakukannya pembukuan adalah tersedianya data BMN yang baik, dan terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, serta optimal.

2. Inventarisasi Barang Milik Negara;

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pada pasal 3 huruf (b) Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, Adapun inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan sensus pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Pengelola Barang secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

Doli D.Siregar (2004) menyatakan inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yudiris atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi/volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yudiris merupakan status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Adapun proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodefikasi/labelling, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Sugiama (2013) menyebutkan inventarisasi aset diharapkan dilakukan secara efektif agar (1) tertib administrasi, (2) pengamanan aset, (3) pengendalian dan pengawasan aset dapat terwujud.

3. Pelaporan Barang Milik Negara;

Menurut PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pada pasal 3 huruf (c) Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan. Maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif yang diartikan sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pelaksanaan pembukuan meliputi : penyampaian Daftar Barang Kuasa Pengguna kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Wilayah dan Eselon I, menyusun dan menyampaikan Daftar Barang Rusak Berat dan Daftar Barang Hilang, menyampaikan mutasi BMN pada Daftar Barang Kuasa Pengguna, menyampaikan laporan hasil inventarisasi, laporan barang kuasa pengguna, dan laporan kondisi barang secara periodik.

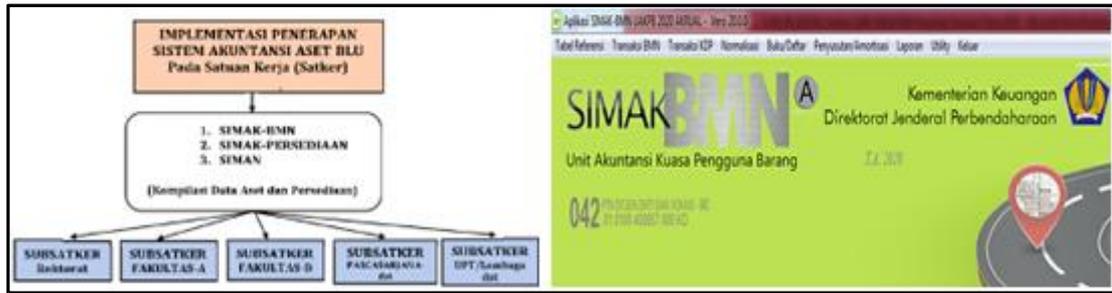
4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara

Menurut (Doli D.Siregar, 2004: 561) yang menyatakan bahwa empat tahapan kerja manajemen aset yakni inventarisasi aset, legal audit, optimalisasi aset, dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) saling berhubungan dan terintegrasi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa SIMAK BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Mahsun dkk. (2011:178) SIMAK BMN dan SAK merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka percepatan penyelesaian penatausahaan dan pengelolaan BMN di satuan kerja maka diperlukan penerapan sistem SIMAK BMN, e-Rekon dan SAKTI untuk membantu mengolah dokumen sumber dalam menghasilkan informasi penyusunan laporan keuangan dan BMN seperti Gambar 1 Struktur Satker dan Gambar 2 SIMAK BMN:



Gambar 2 : Penerapan SIMAK BMN

Penjelasan Gambar 1 dan 2 adalah proses pemetaan pembagian lokasi atau unit kerja sesuai keberadaan aset BMN tersebut berada sebagai UAKPB/Satker/maupun sebagai Subsatker dan proses penerapan aplikasi SIMAK BMN sebagai Satker maupun Subsatker.

Selanjutnya menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan sistem SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.



Gambar 3 : Integrasi data SIMAK BMN pada aplikasi e-Rekon/LK dan e-SAKTI

Sumber: <https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/login> dan <https://sakti.kemenkeu.go.id/login>

Penjelasan Gambar 3 Aplikasi *e-Rekon-LK* dan *e-SAKTI* adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses validasi dan rekonsiliasi data transaksi SIMAK-BMN dan data keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk laporan Neraca, LRA dan rincian aset barang.

5. Kualitas Laporan Keuangan;

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif yang diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat prasyarat normatif yang diperlukan yaitu : (i) relevan, memiliki manfaat umpan balik, tepat waktu, dan lengkap; (ii) andal, penyajiannya jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas; (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama; dan (iv) dapat dipahami, informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah.

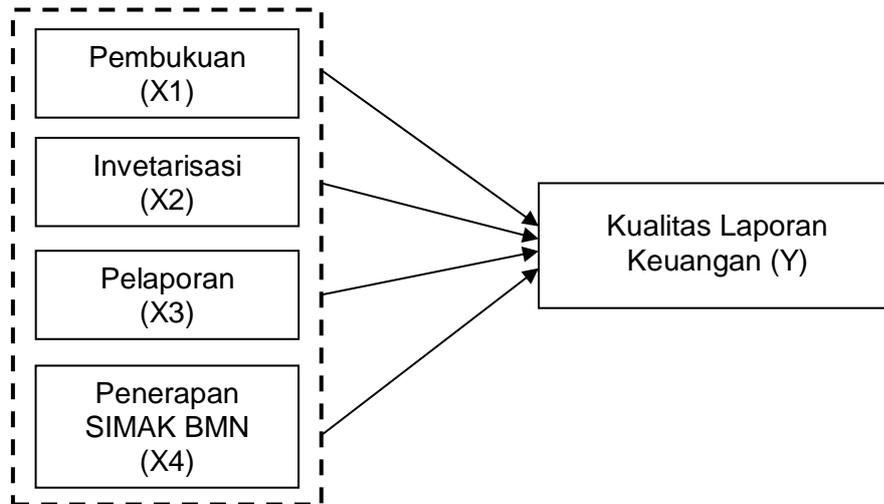
Menurut Bastian (2010:297) Laporan Keuangan Sektor Publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Tujuan pelaporan keuangan umum sektor publik adalah menyediakan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dan mendemonstrasikan akuntabilitas organisasi.

Menurut Ratmono dan Sholihin (2015:11), basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal yang sama dapat ditegaskan oleh Van Der Hoek (2005), penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktek pengelolaan keuangan modern di sektor publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan tentang biaya dan juga dapat meningkatkan kualitas.

III. KERANGKA PENELITIAN

Adapun kerangka penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Variabel Independen Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Penerapan SIMAK BMN terhadap Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan, seperti pada Gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 4: Kerangka Penelitian



Keterangan :

————— : Berpengaruh secara parsial

----- : Berpengaruh secara simultan

Gambar 4 menjelaskan hubungan pengaruh parsial dan simultan antara variabel X dan Y. Jika pembukuan dilaksanakan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Jika inventarisasi dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Jika pelaporan dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Jika penerapan SIMAK BMN dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Sehingga secara simultan atau bersama-sama, jika pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN tinggi, maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang semakin baik.

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesa dalam penelitian ini dirumuskan menjadi empat hipotesa, antara lain:

1. Pengaruh Pembukuan BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang positif, yaitu pembukuan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik petugas akuntansi BMN melakukan pembukuan BMN, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian Febrianti (2016) yang menyatakan bahwa pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, menunjukan

bahwa dengan meningkatnya proses pembukuan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dikarenakan pembukuan BMN merupakan faktor krusial dalam penatausahaan BMN, salah satu tujuan pembukuan BMN merupakan tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, dan optimal agar tercipta kualitas laporan keuangan yang baik.

Perumusan hipotesa mengenai pengaruh Pembukuan BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

H₁ : Pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Pengaruh Inventarisasi BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/ 2016 maksud Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, tersedianya data semua BMN secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN dalam menyampaikan laporan hasil inventarisasi barang secara akurat.

Menurut Doli D.Siregar (2004) menyatakan inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yudiris/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi/volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yudiris merupakan status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain akan memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan aset.

Hal ini membuktikan bahwa hasil penelitian ini disebabkan oleh proses inventarisasi yang sudah cukup terakomodir oleh proses pembukuan sehingga apabila inventarisasi tidak dilakukan, kualitas laporan keuangan akan tetap baik asal pembukuannya juga dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Febrianti (2016) yang menyatakan bahwa variabel inventarisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Perumusan hipotesa mengenai pengaruh Inventarisasi BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

H₂ : Inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Pengaruh Pelaporan BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PMK Nomor 181/PMK.06/2016 maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan.

Semua informasi terkait pengelolaan BMN wajib diungkapkan dalam pelaporan BMN. Kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan pelaporan yang semakin baik. Standar akuntansi pemerintahan harus dipatuhi dan semua data terkait manajemen harus dimasukkan dalam laporan BMN. Laporan BMN lebih berkualitas jika petugas BMN sadar untuk menyajikan semua informasi terkait manajemen (Fitriawati, 2021). Karena keputusan didasarkan pada laporan keuangan, penting untuk memiliki laporan keuangan yang berkualitas untuk membantu pengambilan keputusan (Nurpadi, 2021).

Perumusan hipotesa mengenai pengaruh Pelaporan BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

H₃ : Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Pengaruh Penerapan SIMAK BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 menyebutkan bahwa SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi untuk unit satuan kerja dengan prinsip ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif, dan kelengkapan.

Menurut (Doli D.Siregar, 2004: 561) yang menyatakan bahwa empat tahapan kerja manajemen aset yakni inventarisasi aset, legal audit, optimalisasi aset, dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) saling berhubungan dan terintegrasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian (Novira, 2017) berdasarkan pengujian hipotesis simultan diketahui penatausahaan barang milik

Negara dan Penerapan SIMAK BMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Perumusan hipotesa mengenai pengaruh Penerapan SIMAK BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

H₄ : Penerapan SIMAK BMN berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

IV. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/petugas yang ditunjuk sebagai petugas akuntansi aset dan akuntansi keuangan yang selama ini bekerja pada satuan kerja perguruan tinggi negeri Wilayah Yogyakarta, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran kuesioner, dan populasi dalam penelitian ini adalah 45 orang/kuesioner para petugas/pegawai yang selama ini menangani akuntansi aset dan akuntansi keuangan yang bekerja pada 3 (tiga) PTN (2 BLU 1 satuan kerja) masing-masing 15 orang/satuan kerja perguruan tinggi negeri di wilayah Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesa yang diajukan dengan menggunakan metode penelitian yang telah dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:2009), penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dari objek atau keseluruhan subjek yang hendak diteliti yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

V. HASIL PEMBAHASAN

Uji validitas dan reliabilitas harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis deskriptif. Kedua pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pernyataan yang diajukan dalam kuesioner layak untuk diajukan dan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas tidak ada pernyataan yang harus dihilangkan, semua pernyataan dalam indikator pada

variabel pembukuan, inventarisasi, pelaporan, penerapan SIMAK BMN, dan kualitas laporan keuangan dinyatakan valid. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dapat melakukan analisis deskriptif yang hasilnya ada dalam Tabel 2. Menunjukkan kuesioner yang telah dikumpulkan sebanyak 45 responden, sebagai berikut:

Tabel 2 : Hasil Statistik Deskriptif Jawaban Responden

VARIABEL	RATA-RATA					TOTAL
	DATA 1	DATA 2	DATA 3	DATA 4	DATA 5	
	STS	TS	N	S	SS	
Pembukuan	0	1	7	28	9	45
Inventarisasi	0	2	6	26	11	45
Pelaporan	0	1	5	27	12	45
Penerapan SIMAK-BMN	0	2	5	29	9	45
Kualitas Laporan Keuangan	0	2	5	30	8	45
JUMLAH	0	8	28	140	49	225
Total (skor x Jumlah)	0	16	84	560	245	905
Presentasi (%)	0,00%	1,77	9,28	61,88	27,07	100

Sumber : Data primer hasil olahan 2021

Tabel 2. menunjukkan frekuensi pilihan jawaban empat atau setuju (S) sebesar 560 (61,88%), kemudian diikuti pilihan jawaban lima atau sangat setuju (SS) sebesar 245 (27,07%), pilihan jawaban tiga atau netral (N) sebesar 84 (9,28%), pilihan jawaban dua atau tidak setuju (TS) sebesar 16 (1,77%) dan terakhir pilihan jawaban satu atau sangat tidak setuju (STS) sebesar 0 (0,00%).

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju (S) dalam menjawab pernyataan pada variabel pembukuan, inventarisasi, pelaporan, penerapan SIMAK BMN dan kualitas laporan keuangan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, hal ini membuktikan telah berada pada kategori baik atau tinggi.

Berdasarkan uji asumsi klasik yakni normalitas ketiga variabel tersebut berdistribusi normal yakni sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,053. Berdasarkan uji multikolinearitas menunjukkan ketiga variabel memiliki nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10 artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Berdasarkan uji heteroskedastisitas pola yang dihasilkan menyebar baik

dibawah angka 0 maupun sumbu Y ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Selanjutnya hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 2.643 + 0.980 X_1 + 0.239 X_2 + 0.149 X_3 + 0.138 X_4 + e$$

Adapun ringkasan hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

MODEL	Perhitungan		
	Beta	Thitung	Sig.t
Konstanta	2.643	0.685	0.495
Pembukuan	0,980	5,585	0.000
Inventarisasi	0,239	1.220	0.230
Pelaporan	0.149	0.684	0.482
Penerapan SIMAK-BMN	0.138	0.602	0.550
Asymp.Sig (2-tailed)	0.237		
R (korelasi)	0.652		
Adjusted R Square	0.629		
F hitung	19.914		
Sig. F	0		
Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan			

Sumber : Data primer 2021 yang telah diolah SPSS

Penjelasan Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Penerapan SIMAK BMN secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan *output* pada Tabel 3, diperoleh nilai F hitung sebesar 19.914 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) atau 5-1 yaitu sebesar 4, dan df 2 (n-k-1) atau 45- 4-1 yaitu sebesar 40, maka diperoleh F tabel sebesar 2,61. Karena F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, dan Penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang artinya semakin baik pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik dan optimal sebagaimana dalam Tabel 4. penjelesan dari hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait Variabel Pembukuan (X_1) dimana skor rata-rata persentase sebesar 62,22% menyetujui (S) pernyataan yang dipaparkan, dapat diartikan bahwa pembukuan yang dilakukan petugas akuntansi BMN satker Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta sudah cukup tinggi atau baik terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 4 : Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

VARIABEL	RATA-RATA									
	STS		TS		N		S		SS	
	DATA1	%	DATA2	%	DATA3	%	DATA4	%	DATA5	%
Pembukuan	0	0.00%	1	2.22%	7	15.56%	28	62.22%	9	20.00%
Inventarisasi	0	0.00%	2	4.44%	6	13.33%	26	57.78%	11	24.44%
Pelaporan	0	0.00%	1	2.22%	5	11.11%	27	60.00%	12	26.67%
Penerapan SIMAK-BMN	0	0.00%	2	4.44%	5	11.11%	29	64.44%	9	20.00%
Kualitas Laporan Keuangan	0	0.00%	2	4.44%	5	11.11%	30	66.67%	8	17.78%
JUMLAH	0		8		28		140		49	
Total (skor x Jumlah)	0		16		84		560		245	
Presentasi (%)	0.00%		1.77%		9.28%		61.88%		27.07%	

Sumber : Data primer hasil olahan 2021

Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai Inventarisasi BMN (X_2) sebesar 57,78% yang artinya inventarisasi yang dilakukan petugas akuntansi BMN berada pada kategori tinggi atau baik. Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai Pelaporan BMN (X_3) sebesar 60,00% yang artinya pelaporan yang dilakukan petugas akuntansi BMN berada pada kategori tinggi atau baik. Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai penerapan SIMAK BMN (X_4) sebesar 64,44% yang artinya penerapan SIMAK BMN yang dilakukan petugas akuntansi BMN berada dalam kategori tinggi atau baik. Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan (X_5) sebesar 66,67% yang artinya penyusunan Kualitas Laporan Keuangan yang dilakukan petugas akuntansi BMN juga berada dalam kategori tinggi atau baik.

Penjelasan Pembukuan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Tabel 3. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel pembukuan BMN (X_1) sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_0,2$ ditolak dan H_2 diterima, hal ini berarti pembukuan BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan pembukuan, maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas responden menjawab setuju (S) rata-rata sebesar 62,22% terhadap pernyataan para petugas akuntansi BMN telah mencatat semua data sumber BMN ke dalam SIMAK BMN, dari tertib administrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukuan yang dilakukan petugas akuntansi BMN satker perguruan tinggi negeri Wilayah Yogyakarta sudah cukup baik atau tinggi.

Penjelasan Inventarisasi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 3. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel inventarisasi BMN (X_2) sebesar 0,230 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,3}$ ditolak dan $H_{0,3}$ diterima, hal ini berarti Inventarisasi BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan Inventaris, maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

Berdasarkan hasil tanggapan rata-rata responden terhadap variabel Inventarisasi, dapat dilihat bahwa 57,78% menyetujui (S) pernyataan yang dipaparkan, artinya Inventarisasi BMN pada satker Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggapan responden terhadap pernyataan penyampaian sangat setuju (SS) laporan hasil inventarisasi sebesar 24,44% nilai ini termasuk dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik. Kemudian hasil tertinggi lainnya berasal dari tanggapan responden terhadap pernyataan pencatatan hasil inventarisasi ke dalam kertas kerja hasil inventarisasi dan pelaksanaan sensus barang milik negara. Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada indikator pertama, yaitu pemberian nomor dan nama ruangan sebanyak 4,44% petugas akuntansi BMN memberikan tanggapan tidak setuju karena indikator pada variabel ini saling terkait dengan indikator selanjutnya maka ditemukan pula responden yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk ke-enam indikator lainnya.

Meskipun demikian, persentase tanggapan responden pada indikator pencatatan hasil inventarisasi berada pada kategori sangat baik yaitu pencatatan hasil inventarisasi ke dalam Kertas Kerja Inventarisasi (KKI). Hal ini mungkin saja terjadi karena pencatatan hasil inventarisasi bisa saja berasal dari dokumen sumber terkait pencatatan mutasi BMN pada proses pembukuan, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen kepemilikan, pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, dan dokumen sumber terkait lainnya.

Penjelasan Pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 3. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat sigifikansi variabel pelaporan BMN (X_3) sebesar 0,492 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,4}$ ditolak dan $H_{0,4}$ diterima, hal ini berarti penyusunan Pelaporan BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan penyusunan Pelaporan tepat waktu, maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Hasil pengujian statistik deskriptif mengenai pelaporan menunjukkan skor rata-rata persentase tanggapan menyetujui (S) responden pada satker Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta berada pada kategori tinggi, dikatakan demikian karena pada indikator penyampaian Pelaporan Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Rusak Berat, Daftar Barang Hilang, mutasi, Laporan Hasil Inventarisasi, Laporan Kondisi Barang mendapat persentase sebesar 60.00%. Berdasarkan statistik deskriptif, mayoritas hasil dari jawaban responden menyatakan bahwa pelaporan telah memiliki hasil yang baik. Tetapi walaupun pelaporan berada pada kategori baik, namun jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, meskipun pada variabel pelaporan masih ada responden sebesar 2,22% yang memberikan tanggapan tidak setuju.

Penjelasan Penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 3. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat sigifikansi penerapan SIMAK BMN (X_4) sebesar 0,550 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,6}$ ditolak dan $H_{0,5}$ diterima, hal ini berarti Penerapan SIMAK BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan Penerapan SIMAK BMN, maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

Berdasarkan hasil tanggapan rata-rata responden terhadap variabel Penerapan SIMAK BMN, dapat dilihat bahwa sebesar 64,44% menyetujui pernyataan yang dipaparkan, hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIMAK BMN pada Satker Perguruan Tinggi Negeri berada pada kategori baik. Dari hasil tanggapan responden mayoritas petugas akuntansi BMN sudah melakukan penerapan SIMAK BMN dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan SIMAK BMN, yakni ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif, dan kelengkapan. Namun, pada indikator ketaatan, ditemukan 2 petugas akuntansi BMN atau 4,44% yang menjawab tidak setuju (TS) dan 5 petugas akuntansi BMN atau 11,11% yang memberikan jawaban netral yang artinya masih ada petugas akuntansi BMN yang tidak melaksanakan penerapan SIMAK BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun begitu, kualitas laporan keuangan berada pada kategori baik, indikator lengkap pada variabel kualitas laporan keuangan mendapat persentase 66,67% yang artinya berada pada kategori sangat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMAK BMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada kenyataannya, seluruh satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta telah melaksanakan penerapan SIMAK BMN sebagai Satker maupun Subsatker, sehingga petugas akuntansi BMN pada beberapa Subsatker PTN sudah memahami prinsip-prinsip penerapan SIMAK BMN dan sepenuhnya memanfaatkan sistem tersebut sebagai alat digunakan untuk membantu proses pencatatan sumber data BMN mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi barang milik negara yang akurat.

Indikator yang menjadi penguat efektivitas pengaruh Penatausahaan dan penerapan SIMAK-BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah opini atas pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sebagaimana diketahui, bahwa Penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK-BMN menjadi salah satu sumber utama dalam penyusunan neraca laporan keuangan secara berjenjang mulai tingkat UAKPB atau Satuan Kerja sampai tingkat UAPB atau Kementerian. Semakin banyak Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP, berarti semakin efektif informasi yang disajikan dari hasil Penatausahaan dan penerapan SIMAK-BMN mulai dari tingkat Satuan kerja. Berikut daftar perkembangan opini laporan

keuangan Kemendikbud dan Kemenristekdikti/BRIN periode tahun 2017 s.d. tahun 2021 pada Tabel 5. Perkembangan Opini hasil LHP BPK RI tahun 2017-2021.

NO	BA	KEMENTERIAN	OPINI BPK RI Atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi / BRIN	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber : LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penatausahaan, dan penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas laporan keuangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pengujian hipotesis parsial, diperoleh bahwa :
 - a. Variabel Pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan pembukuan aset tetap kedalam daftar barang inventaris serta memberikan kemudahan akses bagi para pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang milik negara tahun anggaran berikutnya, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.
 - b. Variabel Inventarisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Hal ini dikarenakan kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan negara yang dimiliki atau dikuasai oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) sebagai entitas satuan kerja.
 - c. Variabel Pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Hal ini menunjukkan bahwa dengan proses pelaporan yang tepat waktu dan sesuai asas kepatuhan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
 - d. Variabel Penerapan SIMAK BMN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan dengan dilakukan penerapan SIMAK BMN akan sangat membantu mempercepat proses penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara berdasarkan akuntansi berbasis akrual sesuai peraturan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
- 2) Berdasarkan pengujian hipotesis simultan, diperoleh bahwa Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Penerapan SIMAK BMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

- 3) Secara deskriptif diperoleh gambaran bahwa penatausahaan meliputi Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Penerapan SIMAK BMN, e-Rekon dan SAKTI pada satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta berada pada kategori baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan disimpulkan dalam penelitian ini, maka saran penelitian ini antara lain:

1. Akuntabilitas laporan keuangan satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta harus dilakukan sebaik mungkin, khususnya dalam implementasi penatausahaan BMN dan penerapan SIMAK BMN diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional, dengan mengadakan pelatihan pemutahiran SIMAK BMN dan Penatausahaan BMN yang selalu berkembang bagi pegawai/petugas akuntansi aset.
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel penelitian lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan seperti Optimalisasi Aset, Penilaian aset, Legal audit, serta Pengawasan dan Pengendalian, sehingga dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas nilai neraca dari varians yang dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, Kartika. (2015). *Pengelolaan Barang Milik Negara Secara Akuntabel Menuju Good Governance*.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi 3)*. Jakarta: Erlangga
- Doli D. Siregar 2004, *Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Febrianti, Sukma. (2016) *Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya*. *Jurnal Ekonomi Manajemen*
- Mahsun, Moh., Purwangkara, H.S., dan Sulisty, F. (2011). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)* Yogyakarta: BFE.
- Nasrudin, E. (2015). *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 13(2): 45–56.
- Novira, J., Dini, W.H., & Muhamad, M. (2017). *Pengaruh Penatausahaan Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Ratmono.Dwi, & Sholihin.Mahfud. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yoyakarta.
- Sugiyama, A. G. (2013). Manajemen aset pariwisata: Pelayanan berkualitas agar wisatawan puas dan loyal. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono, (2013:2009), "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D", Penerbit CVAlfa Beta. Bandung.
- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Van Der Hoek, M.P. (2005), From Cash to Accrual Budgeting and Accounting in The Public Sector: The Dutch Experience. Public Budgeting and Finance.